

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL, *GOOD GOVERNANCE* DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA JAMBI)**

**Rita Friyani**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi  
email:ritafriyani@yahoo.co.id

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris bahwa desentralisasi fiskal, good governance dan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah di Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan menggunakan data kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah para pegawai negeri sipil di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi. Sampel penelitian diambil menggunakan teknik judgement sampling. Sampel pada penelitian ini adalah staf minimal golongan IIIa, kepala seksi, kepala sub bagian, kepala bidang yang bekerja dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah dan sekretaris serta kepala dinas di Dinas Pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Jambi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan uji statistik F, uji statistik t dan koefisien determinasi.

**Kata kunci:** Desentralisasi Fiskal, *Good Governance*, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi

**PENDAHULUAN**

Pergantian pemerintahan di Indonesia dari orde baru ke orde reformasi menuntut pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan wewenang yang lebih luas dan bertanggungjawab kepada daerah secara proporsional agar mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan umum di Undang-undangan Otonomi Daerah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Djalil (2014) menjelaskan bahwa dalam dekade terakhir ini, Indonesia dihadapkan dengan isu transparansi dan akuntabilitas. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya krisis ekonomi yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara turun. Oleh sebab itu, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan negara (pusat dan daerah). Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas.

Seperti yang terjadi di Kota Jambi, berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Jambi yang diumumkan pada bulan Mei 2014 bahwa Pemkot Jambi mendapatkan opini Wajar Dengan

---

Pengecualian (WDP) karena adanya pembatasan lingkup pemeriksaan. Batasan dalam hal ini adalah berhubungan dengan masalah aset. Dari empat temuan BPK, total nominal aset yang tidak jelas laporannya mencapai Rp 220,64 Milyar ([www.jambi.tribunnews.com](http://www.jambi.tribunnews.com)). Hal ini sama dengan hasil pemeriksaan BPK tahun 2012 dimana Pemerintah Kota Jambi juga mendapatkan WDP. Pada tahun tersebut dinyatakan total nominal aset yang tidak jelas laporannya mencapai Rp 204,97 milyar. Pencatatan nilai aset yang dinyatakan tidak jelas tersebut dikarenakan pencatatan nilai aset tidak didukung dengan rincian pada Database Manajemen Daerah (DBMD). Selain itu, Pemerintah Kota Jambi juga tidak memutakhirkan pencatatan aset-aset yang dianggap tidak jelas laporannya tersebut sehingga tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas nilai aset tersebut. BPK menilai bahwa tidak terdapat peningkatan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kota Jambi ([www.antarajambi.com](http://www.antarajambi.com)).

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Djalil, 2014). Diperlukan kiat dan kebijakan dari pemerintah agar dapat mencapai hal tersebut. Djalil (2014) dalam bukunya menjelaskan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal, penerapan *good governance* dan laporan keuangan yang berkualitas merupakan beberapa contoh cara agar dapat mencapai atau meningkatkan akuntabilitas keuangan negara (pusat dan daerah).

*Good governance* menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kemandirian sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintahan benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara tak lepas dari masalah akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah (Cadbury, 1992 yang dikutip Media Akuntansi 2000 dalam Zeyn, 2011). Apabila pemerintah telah melaksanakan prinsip *good governance*, berarti telah akuntabel pula pengelolaan keuangannya.

Pemerintah dituntut untuk transparan dan akuntabel, terutama dalam mengalokasikan uang negara untuk melaksanakan kegiatan. Untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan, maka pemerintah harus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Djalil, 2014). Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang telah berpedoman dengan standar akuntansi pemerintahan. UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang kemudian diikuti dengan PP No. 24 Tahun 2005 yang disempurnakan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mewajibkan pemerintah pada setiap level baik pusat maupun daerah untuk menyusun laporan keuangan (Mardiasmo, 2002). Pembentukan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Standar akuntansi pemerintahan mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas (Tanjung, 2013). Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Untuk mencapai hal tersebut, standar akuntansi pemerintahan menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian

---

laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Apakah desentralisasi fiskal, *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kota Jambi?
2. Apakah desentralisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kota Jambi?
3. Apakah *good governance* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kota Jambi?
4. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah kota Jambi?

## **METODE PENELITIAN**

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti (Arikunto, 2010). Subjek penelitian ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi. Objek penelitian yaitu apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2010). Objek penelitian ini adalah pengaruh desentralisasi fiskal, *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan.

### **Jenis dan Sumber Data**

Sekaran (2006) menyatakan bahwa data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Indriantoro dan Supomo (2013) menyatakan bahwa data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer ini diperoleh melalui metode survei menggunakan kuesioner kepada kepala dinas, sekretaris, kasubbag, kabid, kasi dan staf pada DPKAD Kota Jambi.

### **Metode Pengumpulan Data**

Perolehan data primer yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberi daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner tentang *good governance*, standar akuntansi pemerintahan dan akuntabilitas keuangan diambil dari kuesioner penelitian dari Zeyn (2011) dengan adanya revisi di beberapa pertanyaan. Sedangkan, kuesioner tentang desentralisasi fiskal diambil dari kuesioner penelitian dari Maryanti (2013) dengan adanya revisi di beberapa pertanyaan. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi dan membagi kuesioner secara langsung ke DPKAD Kota Jambi. Setiap paket kuesioner terdiri dari dua bagian yang harus dijawab oleh responden dengan mengikuti perintah yang terdapat di dalam setiap bagian. Bagian pertama berisi pertanyaan yang berhubungan dengan data demografi responden yang meliputi jenis kelamin, pendidikan dan jabatan. Bagian kedua berisi

---

pertanyaan yang berhubungan dengan desentralisasi fiskal, *good governance*, standar akuntansi pemerintahan dan akuntabilitas keuangan.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pegawai negeri sipil di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Jambi yang terdiri dari 1 orang kepala dinas, 1 orang sekretaris, 3 orang kepala bidang, 2 kepala sub bagian, 8 kepala seksi dan 27 staf yang berjumlah 42 orang.

Peneliti menggunakan *Judgement Sampling* (Pemilihan Sampel Berdasarkan Pertimbangan) dalam menentukan sampel, yaitu tipe pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh umumnya disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2013). Peneliti hanya menggunakan staf minimal golongan IIIa, kepala seksi, kepala sub bagian dan kepala bidang yang menggunakan sistem akuntansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta sekretaris dan kepala dinas sebagai sampel, sehingga sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 31 orang.

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel penelitian pada dasarnya merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Variabel yang digunakan pada penelitian ini ada lima, yaitu Desentralisasi Fiskal (variabel  $X_1$ ), *Good Governance* (variabel  $X_2$ ), dan Standar Akuntansi Pemerintahan (variabel  $X_3$ ) sebagai variabel independen serta Akuntabilitas Keuangan (variabel Y) sebagai variabel dependen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal, *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi**

Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh desentralisasi fiskal, *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil signifikansi uji F pada penelitian ini sebesar 0.005 ( $<0.05$ ) sehingga hipotesis pertama ( $H_a$ ) pada penelitian ini diterima. Diterimanya hipotesis ini juga dikarenakan nilai  $F_{hitung}$  lebih besar dari  $F_{tabel}$  ( $5.594 > 2.96$ ), maka dari itu dapat disimpulkan bahwa desentralisasi fiskal, *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kota Jambi. Hasil penelitian ini membawa implikasi bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kota Jambi, dituntut untuk melaksanakan desentralisasi fiskal, menerapkan *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan dengan baik.

Akuntabilitas keuangan pemerintah bisa tercapai apabila pemerintah bertekad untuk menerapkan prinsip *good governance*. *Good Governance* dapat diartikan sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengendalian yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya (Zeyn, 2011). *Good governance* menghendaki pemerintahan yang dijalankan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keadilan dan kemandirian, sehingga sumber daya

---

negara yang berada dalam pengelolaan pemerintahan benar-benar mencapai tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Apabila pemerintah telah menerapkan prinsip *good governance* dengan baik, maka akuntabilitas keuangan yang merupakan salah satu dari prinsip dari *good governance* akan meningkat pula.

Standar akuntansi pemerintahan merupakan standar yang harus diikuti dalam laporan keuangan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Laporan keuangan harus disusun berpedomankan standar akuntansi pemerintahan. Apabila laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, maka laporan keuangan itu dapat dibuktikan kualitasnya dan telah mewujudkan akuntabilitas keuangan. Jadi, apabila standar akuntansi pemerintahan telah diterapkan dengan baik, maka dapat telah mewujudkan salah satu tahap dari akuntabilitas keuangan.

### **Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi**

Hasil uji hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-1.427 < 2.0452$ ) dengan signifikansi sebesar  $0.165$  ( $P > 0,05$ ). Dengan demikian,  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$  serta dapat dinyatakan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi. Hal ini menunjukkan bahwa adanya desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan.

Tujuan dilaksanakannya desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah sehingga dapat membiayai kegiatan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Desentralisasi fiskal dilaksanakan karena pemerintah daerah lebih mengetahui apa prioritas kebutuhan dari daerahnya sendiri dibanding pemerintah pusat. Hal ini menjadikan pembiayaan atau pengeluaran dilakukan secara lebih efisien dan lebih akuntabel. Akan tetapi hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kota Jambi. Hal ini mungkin dikarenakan kebijakan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya dapat dipenuhi dan dilaksanakan dengan baik. Djalil (2014) juga menjelaskan bahwa wujud dan bentuk desentralisasi fiskal di Indonesia baru didistribusikan pada sisi pengeluaran yang didanai terutama melalui dana transfer ke daerah untuk membelanjakan dana sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Sementara desentralisasi fiskal untuk sisi penerimaan belum diterapkan secara nyata dimana pemerintah pusat masih menguasai basis pajak dalam jumlah yang besar, sedangkan pemerintah kabupaten/kota masih mengelola pajak dalam jumlah relatif kecil dikarenakan adanya pembatasan otonomi dari sisi penerimaan. Keterbatasan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan daerah ini menjadikan pemerintah kurang maksimal dalam melakukan kegiatan pembangunan daerah atau pelayanan publik.

### **Pengaruh *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi**

Hasil uji hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kota Jambi. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0.938 < 2.0452$ ) dengan signifikansi sebesar  $0.356$  ( $P$

---

> 0,05). Dengan demikian,  $H_0$  diterima dan menolak  $H_a$  serta dapat dinyatakan bahwa *good governance* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

Mardiasmo (2006) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*, dimana pengertian dasarnya adalah pemerintahan yang baik. Hal ini berupaya untuk menciptakan suatu penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab sejalan dengan prinsip demokrasi, efisiensi, pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administrasi.

### **Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi**

Hasil uji hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kota Jambi. Hasil uji menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  variabel standar akuntansi pemerintahan ( $X_3$ ) adalah 4.188 berarah positif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  ( $4.074 > 2.0452$ ) dengan signifikansi sebesar 0.000 ( $P < 0,05$ ). Dengan demikian,  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$  serta dapat dinyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Desentralisasi Fiskal, *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
2. Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
3. *Good Governance* tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.
4. Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

### **Saran**

1. Desentralisasi fiskal, *good governance* dan standar akuntansi pemerintahan perlu diterapkan lebih baik lagi dalam pemerintahan Kota Jambi agar dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kota Jambi. Apabila dari sisi *governance* di pemerintah daerah sudah baik, maka visi dan misi serta kebijakan-kebijakan di pemerintah daerah Kota Jambi akan terlaksana dengan baik dan dapat tercapai.
2. DPKAD sebagai SKPD yang bertugas mengelola keuangan dan aset daerah harus menjalankan dan mengelola kebijakan desentralisasi fiskal dan melaksanakan prinsip *good governance* dengan baik karena tujuan desentralisasi fiskal yang salah satunya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan tidak dapat terpenuhi jika belum dapat memenuhi prinsip *good governance*.

- 
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengurangi keterbatasan-keterbatasan pada penelitian ini. Selain itu, para peneliti selanjutnya dapat menambah beberapa variabel independen lain, seperti tujuan dan sasaran anggaran, ilmu pengetahuan dan teknologi.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya sehingga laporan penelitian ini bisa diselesaikan. Ucapan terima kasih diberikan kepada Rektor Universitas Jambi, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jambi dan semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 2010. Rineka Cipta: Jakarta.
- Arja, Sadjarto. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 2, No. 2, November 2000: 138-150.
- Bahl, Roy. 1999. *Implementation Rules for Fiscal Decentralization*.
- Bird, Richard dan Vaillancourt Francois. 2000. *Desentralisasi Fiskal di Negara-negara Berkembang*. Terjemahan Almizan Ulfa. PT Gramedia Pusat Utama: Jakarta.
- Djalil, Rizal. 2014. *Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi*. RMBOOKS: Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis: untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE: Yogyakarta.
- Jogiyanto, 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE: Yogyakarta.
- Liu, Chih Hung. 2007. *What Type of Fiscal Decentralization System has Better Performance*. School of Public Policy.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol. 2, No. 1, Mei 2006.